

## “KEUTUHAN WILAYAH AZERBAIJAN TIDAK PERNAH DAN TIDAK AKAN PERNAH MENJADI BUAH PERUNDINGAN”



*Wawancara menteri luar negeri Azerbaijan Elmar Mammedyarov untuk majalah “IRS-WARISAN”*

**- Pada 16 Juli tahun 2015, Kamar Besar Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia mengumumkan keputusannya yang berkaitan dengan kasus “Ciragov dan lainnya vs Armenia”. Mohon ceritakan kepada kami secara garis besar latar belakang terjadinya kasus ini?**

- Seperti Anda ketahui, kasus yang Anda rujuk ini berasal dari pengaduan yang ditujukan kepada Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia terhadap Repub-

lik Armenia, yang diajukan pada tanggal 6 April tahun 2005 oleh enam warga Azerbaijan yang secara paksa diusir dari distrik Lacin akibat agresi Armenia terhadap Azerbaijan. Pada hakekatnya, orang-orang yang mengajukan pengaduan ke mahkamah ini, tidak mampu untuk kembali ke kampung halamannya di distrik Lacin sehubungan dengan didudukinya distrik tersebut oleh angkatan bersenjata Armenia sehingga mereka tidak bisa menggunakan harta miliknya sendiri. Dalam pe-

ngaduannya para pengadu menyatakan bahwa hal ini merupakan kelanjutan dari pelanggaran hak milik yang ditetapkan dalam Pasal 1 dari Protokol nomor 1 dari Konvensi “Tentang Perlindungan Hak Asasi dan Kebebasan Fundamental Manusia” dan hak untuk menghormati kehidupan pribadi dan keluarga yang ditetapkan dalam Pasal 8 dari Konvensi ini. Dalam pengaduan itu juga dikatakan bahwa tidak adanya sarana efektif untuk pengaduan di atas, dan hal itu merupakan pelanggaran Pasal 13 dari Konvensi. Akibatnya, sehubungan dengan semua pengaduan di atas, mereka mengajukan pengaduan mengenai pelanggaran Pasal 14 dari Konvensi, karena terkena diskriminasi dari segi asal-usul etnis dan agama.

**- Keputusan apakah diambil oleh Mahkamah?**

- Mahkamah memutuskan untuk mendukung para pengadu, mengenali berkelanjutannya perlawanan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Armenia dalam konvensi tersebut. Bagaimanapun juga, keputusan mahkamah internasional ini cukup penting sebagai otoritas kewibawaan mereka.

**- Apa pandangan Azerbaijan tentang makna dasar dari keputusan Mahkamah Eropa mengenai Hak Asasi Manusia ini?**

- Keputusan Mahkamah sangatlah penting bagi

sejumlah aspek. Pertama dan utama, keputusan Mahkamah Eropa cukup efektif untuk menghentikan Armenia dari penolakannya untuk bertanggung jawab atas pelanggaran hukum penguasaan wilayah dan penempatan angkatan bersenjata mereka di wilayah Azerbaijan. Sebagaimana diketahui, sejak dimulainya agresi militer Armenia dan selama proses pengadilan kasus Yerevan ini, seperti biasanya Armenia melakukan usaha untuk mengelabui masyarakat internasional dan mendistorsi akar dan esensi konflik ini, menyatakan bahwa yurisdiksinya tidak meliputi wilayah Garabagh Atas dan daerah-daerah sekitarnya, bahwa Yerevan tidak mampu dan tidak efektif untuk mengambilalih kendali atas wilayah-wilayah tersebut dan tidak dapat menjalankan otoritas publik apapun. Selain itu, Armenia menegaskan bahwa mereka tidak berpartisipasi dalam konflik militer tersebut, pendudukan distrik Lacin dan operasi-operasi militer lain, dan tidak menggirimkan pasukan militer apapun di Garabagh Atas dan daerah-daerah sekitarnya.

Semua bukti yang dikemukakan oleh para pengadu dipelajari oleh Mahkamah, dan semua pernyataan Armenia tersebut ditolak oleh pemerintah Azerbaijan.

Selain itu, dalam keputusan tersebut Ayat 14-18, Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia

*Para pengungsi Azerbaijan terusir dari Armenia*



menekankan bahwa konflik ini dimulai karena akibat diperintahkannya penggabungan antara Garabagh Atas dengan Armenia. Lebih jauh lagi, Mahkamah Eropa mencatat secara khusus bahwa berdasarkan pernyataan bersama yang dibuat oleh Dewan Tertinggi Republik Sosialis Sovyet Armenia dan Dewan regional Garabagh Atas tentang “reunifikasi” yang diadopsi pada Desember tahun 1989. Pada dasarnya Mahkamah menegaskan bahwa klaim wilayah oleh Armenia dan usahanya dalam mencapai tujuan penganeksasian bagian dari wilayah Azerbaijan, adalah akar penyebab konflik bersenjata ini dan memicu kuat teretusnya perang. Dalam Ayat 180, Mahkamah juga sudah menegaskan bahwa – berikut saya kutipkan pernyataan dari keputusannya – “Republik Armenia, dengan menempatkan pasukan militer, penyediaan pelengkapan peralatan militer dan para ahlinya, secara signifikan telah terlibat dalam konflik Garabagh Atas sejak dari awal”, “dukungan militer Armenia sudah menjadi dan akan terus berlanjut menjadi faktor

yang menentukan dalam penaklukan dan pengendalian tetap atas wilayah-wilayah tersebut”, “bukti-bukti secara meyakinkan menunjukkan bahwa angkatan bersenjata Armenia dan “Republik Garabagh Atas” terintegrasi”. Berdasarkan hal ini dan bukti-bukti lain bersaksi bahwa rezim separatistis memiliki ketergantungan politik, keuangan dan lainnya dari Armenia, dalam Ayat 186 Mahkamah menyimpulkan sebagai berikut: “Pada awal masa konflik Garabagh Atas, Republik Armenia telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap Republik Garabagh Atas, yang mana kedua rezim ini sangat terintegrasi dalam semua isu-isu penting dan situasi ini masih berlanjut hingga sekarang” dan “Republik Garabagh Atas” serta administrasinya bereksistensi berkat dukungan militer, politik, keuangan dan lainnya yang diberikan oleh Armenia. Akibatnya, Armenia mengambil kendali atas Garabagh Atas dan wilayah-wilayah sekitarnya, termasuk Lacin”.

- **Meskipun Mahkamah sudah memberikan**



**keputusan tegas, akan tetapi pihak Armenia tetap bersikeras terus menyatakan bahwa Armenia tidak menduduki wilayah Azerbaijan, dan keputusan tersebut tidak cukup kuat sekalipun untuk kesaksian yang berlawanan. Pihak Armenia juga menyatakan bahwa keputusan ini berlaku hanya untuk hak-hak perlindungan yang berlaku dalam Konvensi Eropa untuk Hak Asasi Manusia. Bagaimana pendapat Anda tentang pernyataan ini?**

- Sayangnya Armenia, bukannya menarik kesimpulan yang sudah lama harus ditarik dan bukannya mendemonstrasikan sikap yang konstruktif dalam perundingan, melainkan, seperti biasa, menunjukkan kesetiaan kepada penolakan fakta-fakta yang tidak bisa dibantah, demi untuk mengelabui masyarakat dunia dan menyamarkan politik pendudukan yang dianutnya. Memang, pernyataan-pernyataan ini tidak bisa lebih daripada kebenaran. Untuk membantah kemunafikan yang tidak berdasar ini cukuplah dengan seksama membaca keputusan tersebut, khususnya pasal yang baru saya rujuk.

Merujuk pada kasus hukum ini, Mahkamah membuat kesimpulan bahwa sesuai dengan hukum internasional, pendudukan merupakan pelaksana kewenangan yang sebenarnya bagi sebuah negara atas wilayah atau bagian dari wilayah negara lain. Menurut Mahkamah, persyaratan otoritas yang sebenarnya dalam arti luas dianggap identik dengan kontrol yang efektif. Akibatnya, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang dikemukakan, Mahkamah membuat kesimpulan bahwa, sebagai dampak dari pendudukan militer atas wilayah ini, Armenia telah mengambilalih dan terus melakukan kontrol yang efektif atas Garabagh Atas dan wilayah-wilayah lain yang didudukinya (Pasal 96 dan 168).

Bertentangan dengan pernyataan-pernyataan para pejabat Armenia, Mahkamah membuat kesimpulan penting bahwa Garabagh Atas, Lacin dan wilayah-wilayah yang berdampingan lainnya merupakan bagian dari Azerbaijan dan dewasa ini berada di bawah pendudukan militer (Pasal 146 dan 173), dan bahwa pendudukan / hukum internasional dan hukum humaniter internasional berlaku untuk diterapkan dalam situasi tersebut (Pasal 96-97), Armenia adalah penjajah atas wilayah-wilayah Azerbaijan yang diduduki, dan sesuai dengan peristilahan hukum internasional, mengambilalih kontrol yang efektif atas wilayah-wilayah ini. Mahkamah hanya menegaskan mengenai hal yang telah lama terjadi yang menjadi masalah reputasi umum dan di tingkat masyarakat internasional.



**Akibat penembakan dan serangan langsung oleh orang-orang Armenia, di Garabagh, setiap hari puluhan orang tewas**

Seperti yang dapat dilihat dari keputusan Mahkamah, selama proses pengadilan, Armenia berupaya membenarkan invasinya ke Lacin, penghancuran dan pembakaran, serta pengusiran paksa penduduk Azerbaijan dengan dalih "pertahanan diri" dan "pasokan kebutuhan ke Garabagh Atas seperti makanan, obat-obatan dan perlengkapan lainnya". Pihak Armenia menyatakan bahwa berhubungan dengan hal itu Mahkamah membuat catatan tersendiri. Adapun kutipannya sebagai berikut: "Dalam hal agresi Azerbaijan pembebasan Lacin mempunyai arti yang sangat penting untuk keselamatan penduduk Garabagh Atas".

**- Apakah Mahkamah membuat pernyataan yang kontroversial?**

- Seperti yang Anda lihat, perasaan ini menginspirasi Armenia dalam penguatan pengalamannya untuk memutarbalikkan dan memalsukan fakta-fakta dan dokumen-dokumen organisasi internasional. Pernyataan-pernyataan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah kebohongan belaka. Armenia tidak canggung dan ragu berupaya memanipulasi keputusan lembaga berwibawa seperti Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia. Dalam keputusan itu sama sekali tidak ada ungkapan seperti "agresi Azerbaijan" atau "pembebasan Lacin". Siapa saja yang tertarik, saya sarankan untuk mencari keputusan Mahkamah lewat Internet. Pada kenyataannya, Mahkamah menolak semua argumen Armenia yang membenarkan serangan militer dan pengusiran masal paksa warga sipil dengan dalih "kebutuhan militer".

Hal yang mengkhawatirkan terkait dengan upaya Armenia untuk membenarkan dengan cara dan langkah yang tidak sehat dari sudut pandangan internasional, dengan argumen-argumen yang tidak beralasan.



*Aghdam – kota yang pernah makmur, sesudah diduduki oleh Armenia, berubah menjadi reruntuhan*

Ini tidak dapat diterima, dan dapat membawa kerugian serius dalam usaha perlindungan norma-norma yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang ditentukan oleh Konvensi dan diterima secara universal, serta pada peran Konvensi yang merupakan instrumen konstitusional ketertiban umum di Eropa ini. Masyarakat internasional harus dengan tegas menolak perilaku tidak terpuji itu, yang dilakukan terhadap Konvensi dan Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia.

**- Bagaimana Mahkamah menilai kondisi pengusiran paksa penduduk Lacin dari kampung halamannya?**

- Yang paling penting adalah kesimpulan Mahkamah, *inter alia*, yang terkandung dalam Pasal 19-20 mengenai serangan militer distrik Lacin, khususnya kota Lacin, mengenai pengeboman Lacin dari udara pada pertengahan Mei tahun 1992, dan sebagai akibatnya, banyak rumah yang hancur, perampasan dan pembakaran kota, penghancuran Lacin dan desa-desa sekitarnya selama periode konflik militer. Mahkamah membenarkan bahwa niat pihak Armenia yang menyebabkan kerugian dan penderitaan yang besar bagi penduduk Azerbaijan

yang melarikan diri untuk menyelamatkan jiwanya. Kita ingat bahwa para pejabat Organisasi Keamanan dan Kerja sama di Eropa (OKKE), yang mengunjungi wilayah konflik pada tahun-tahun 1992-1993, mengutuk taktik Armenia yang disebut “bumi yang telah dihancurkan” (“scourged earth”) sebagai fakta yang tidak dapat diterima, dengan menyebut fakta ini sebagai praktik pembersihan etnis kotor.

Patut diingatkan bahwa operasi militer dalam satu hari terhadap wilayah kota Khojali daerah Garabagh Atas Azerbaijan, yang dikenal dalam sejarah sebagai genosida terbesar terhadap rakyat Azerbaijan selama konflik, serangan Lacin, invasi ke Kelbajar dan pendudukannya dilakukan secara langsung oleh angkatan bersenjata Armenia dan menyebabkan diterimanya serangkaian resolusi yang dikenal baik oleh Dewan Keamanan PBB.

Patut juga dicatat bahwa menurut definisi yang diadopsi pada tahun 1974 oleh Majelis Umum PBB mengenai konsensus, invasi dan serangan oleh suatu negara atas wilayah negara lain, atau bahkan agresi militer sementara akibat invasi dan serangan itu, serta pengeboman oleh suatu negara atas wilayah negara lain, atau penggunaan senjata apapun oleh suatu negara terhadap wilayah negara lain, adalah manifestasi agresi yang paling nyata. Seperti ditegaskan oleh Mahkamah, serangan militer oleh pasukan Armenia dan pasukan yang didukung oleh Armenia dan pengeboman dari udara terhadap Lacin dan kota-kota dan desa-desa Azerbaijan lainnya merupakan serangan bersenjata, dan sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB, menetapkan hak Azerbaijan untuk pertahanan diri. Ini ditetapkan dalam hukum internasional satu kali dan untuk selamanya.

**- Setelah pengumuman keputusan Mahkamah, pihak Armenia membuat sejumlah pernyataan kontradiktif. Misalnya, pada tanggal 13 Juni, deputi Menteri Keadilan Armenia dan wakil Armenia di Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia, -Emil Balayan-, menyatakan bahwa keputusan Mahkamah bisa mengakibatkan konsekuensi politik dan geopolitik, dan dampak keputusan ini pada penyelesaian konfliknya dilakukan secara damai, serta proses negosiasi yang tak terhindarkan. Pada saat yang sama, menteri luar negeri Armenia Edward Nalbandyan dalam komentarnya baru-baru ini, menyatakan bahwa keputusan yang diambil oleh Mahkamah Eropa untuk hak Asasi Manusia pada “Kasus Ciragov” sama sekali tidak berdampak dalam proses negosiasi. Bagaimana pendapat Anda, apa yang ada di belakangan pesan-pesan**

*Aghdam – kota yang pernah makmur, sesudah diduduki oleh Armenia, berubah menjadi reruntuhan*

**kontradiktif dari Yerevan ini? Sudilah kiranya Anda berbagi pandangan mengenai potensi dampak dari keputusan tersebut pada proses negosiasi.**

- Jelas bahwa, seperti yang kami harapkan, keputusan Mahkamah menyebabkan Armenia terkejut. Pernyataan-pernyataan kontradiktif para pejabat Armenia adalah tanda kekhawatiran Armenia terhadap keputusan Mahkamah yang tak ada presedennya, dan pengaruh luas yang tidak bisa dihindari akibat dari keputusan ini.

Sebagaimana telah saya catat, keputusan Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia adalah penting dari beberapa segi. Keputusan ini untuk pertama kalinya menjamin penganalisaan yang adil yang pernah dilakukan oleh Mahkamah, pihak ketiga dan kondisi penilaian hukum yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia warga Azerbaijan yang ditentukan dalam Konvensi.

Khususnya, Mahkamah menegaskan kembali hak warga sipil yang dipaksa pindah untuk kembali ke rumah atau kediamannya, dan mengingatkan standar dan prinsip-prinsip yang bersangkutan dengan hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia, sehubungan dengan masalah-masalah hukum dan teknis terkait dengan pengembalian rumah dan harta benda. Dalam konteks ini, sebagaimana tercermin dalam Pasal 195 keputusan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalam situasi sekarang ini hambatan utama untuk mengembalikan orang-orang Azerbaijan ke kampung halamannya adalah karena tentara Armenia masih menempati wilayah-wilayah yang diduduki dan pelanggaran rezim gencatan senjata.

Dari hari pertama, pihak Azerbaijan menyatakan bahwa penempatan angkatan bersenjata Armenia secara ilegal yang masih berlanjut hingga sekarang di wilayah-wilayah yang didudukinya merupakan ancaman utama dalam perdamaian regional dan hambatan utama untuk penyelesaian konfliknya. Mahkamah, pada



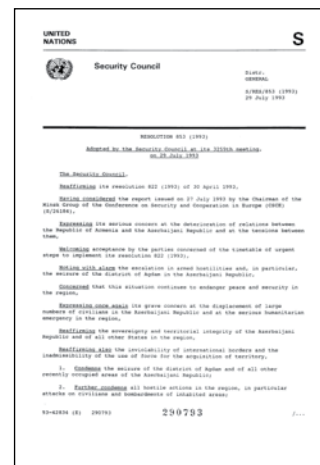
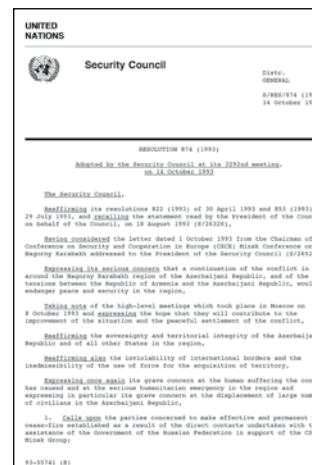
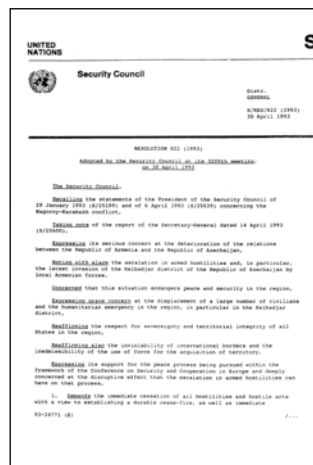
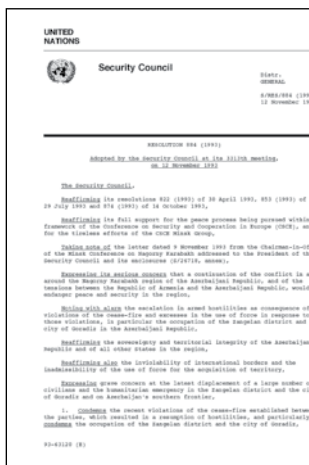
hakekatnya, setuju dengan posisi Azerbaijan mengenai hak-hak perlindungan warga Azerbaijan yang ditentukan dalam Konvensi, dan dalam pemahaman yang lebih luas, mengenai hal penarikan tentara Armenia dari wilayah-wilayah yang diduduki adalah syarat *sine qua non* dalam penyelesaian konfliknya.

Selain itu, masalah yang paling penting menurut saya adalah masalah eksistensial bagi kami. Maksudnya adalah kembalinya warga-warga Azerbaijan ke kampung halamannya di Garabagh Atas dan distrik-distrik sekitarnya yang berada sekarang di bawah pendudukan tentara-tentara tersebut. Armenia, sebaliknya, selalu berusaha menghalangi kembalinya warga-warga Azerbaijan ke kampung halamannya, atau memberikan syarat-syarat untuk mempersulit proses pengembalian warga Azerbaijan ke tempat asalnya. Dalam keputusan Mahkamah ditegaskan bahwa perundingan yang ber-

tercapai keberhasilan dengan cara-cara yang perspektif. Untuk alasan yang sama, Mahkamah menentukan bahwa tidak ada cara efektif untuk pemulihan hak-hak yang dilanggar oleh Armenia karena para pengadu tidak diperbolehkan menggunakan harta dan tanah mereka di distrik Lacin.

Keputusan Mahkamah telah mengkonfirmasi lagi bahwa kembalinya orang-orang Azerbaijan ke kampung halamannya bukanlah wacana bantahan hukum, dan solusi apa pun harus efektif guna menjamin hak-hak para warga Azerbaijan ini.

Patut diingat bahwa keputusan Kamar Besar Mahkamah sudah final dan menjadi sebuah komitmen hukum. Dewan Eropa memiliki mekanisme yang stabil untuk memantau pelaksanaan keputusan-keputusan Mahkamah. Setelah keputusan Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia, isu perlindungan hak-hak orang-orang



**4 resolusi PBB tentang pendudukan tanah Azerbaijan oleh angkatan bersenjata Armenia**

langsung dalam batas Grup Minsk OKKE, tidak memberikan alasan hukum untuk mencampuri hak-hak, termasuk hak milik yang berlaku orang-orang Azerbaijan yang dipindah paksa, dan keputusan ini juga mengingatkan kewajiban Armenia terhadap warga Azerbaijan yang terkena pengusiran selama konfliknya. Menurut Mahkamah (Pasal 148 dalam keputusannya), upaya pihak Armenia untuk menguasai hak tanah orang-orang Azerbaijan yang dipindah paksa akibat pengusiran tersebut tidak dapat dianggap sah dari segi hukum. Menentukan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Armenia terhadap hak-hak orang-orang Azerbaijan yang dipindah paksa, Mahkamah menyimpulkan bahwa Armenia tidak memenuhi komitmennya terhadap para pengadu untuk membereskan kasus pelanggaran hak-hak yang ditentukan dalam Konvensi dan menjamin

Azerbaijan yang dipindah paksa akibat pengusiran dari Garabagh Atas dan daerah-daerah sekitarnya akan tetap ada dalam agenda Dewan Eropa dan strukturnya.

**- Sehubungan dengan dampaknya pada proses perundingan, tanggung jawab internasional apakah ditentukan oleh keputusan ini untuk Armenia?**

- Hasil keputusan Mahkamah yang paling penting adalah bahwa Republik Armenia harus bertanggung jawab atas perang yang dicituskan terhadap Azerbaijan dan agresi yang dilangsungkannya sampai sekarang, pendudukan militer wilayah Azerbaijan yang diakui secara internasional, pengusiran ratusan ribu warga Azerbaijan dari daerah-daerah okupasi, pencegahan kembalinya mereka ke kampung halamannya dan penggunaan harta milik warga di daerah-daerah itu, bertanggung jawab kepada dunia internasional secara penuh

atas apa yang sudah terjadi dan pelanggaran hukum internasional yang tengah berlangsung terus.

Tanggung jawab negara dan tuntutan utama yang merupakan poin penting dalam kasus ini adalah penanggulangan pelanggaran yang dilakukan Armenia, penuntut komitmen Armenia bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak akan diulangi lagi, dan membayar penuh atas semua kerugian yang disebabkan.

Tuntutan bagi Armenia adalah berkewajiban untuk menghentikan okupasi di wilayah Azerbaijan dan menarik semua angkatan bersenjata dari wilayah ini dengan segera dan tanpa syarat. Pemenuhan kewajiban-kewajiban untuk mengembalikan ke kampong halamannya sama sekali tidak patut dianggap atau digambarkan sebagai kompromi dalam proses penyelesaian konfliknya atau sebagai cara “tawar-menawar” dalam proses penyelesaiannya.

**- Bagaimana posisi Mahkamah terkait dengan rezim ilegal yang didirikan oleh Armenia di wilayah-wilayah Azerbaijan yang didudukinya?**

- Selama proses pengadilan, Armenia menegaskan bahwa “Republik Garabagh Atas” (“RGA”) dalam konteks hukum internasional merupakan negara berdaulat dan merdeka dengan indikator bahwa “negara ini memiliki kontrol dan yurisdiksi atas Garabagh Atas dan daerah-daerah sekitarnya”, bahwa Republik Armenia dan “RGA” adalah negara-negara mempunyai pemerintahan tersendiri, dan bahwa “RGA” sejak saat didirikannya menganut politik merdeka sendiri, termasuk politik sosial dan keuangan.

Setelah mempertimbangkan fakta-fakta dan dalil-dalil yang dikemukakan, Mahkamah menolak pernyataan-pernyataan tersebut, dan dengan merujuk kepada keputusan sendiri tentang penerimaan perkara ini untuk pengadilan yang tertanggal 14 Desember tahun 2011, menegaskan dalam Ayat 148 bahwa “RGA” tidak diakui sebagai negara dalam konteks hukum internasional”, dan menegaskan kembali dalam Ayat 28 bahwa “RGA” yang memproklamasikan kemerdekaannya tidak diakui sebagai sebuah negara oleh negara atau organisasi internasional mana pun”, dengan demikian, sekali lagi membenarkan sikap masyarakat internasional yang menolak dengan tegas struktur yang dibuat-buat ini dan menolak mengakui legitimasi keadaan yang diciptakan dengan penggunaan kekuatan terhadap keutuhan wilayah Azerbaijan dan disertai dengan pemberisan etnis dan pelanggaran jahat lainnya. Selain itu, Mahkamah menentukan bahwa rezim separatis itu selu-

ruhnya dan sepenuhnya tergantung pada Armenia dan “bereksistensi berkat dukungan militer, politik, keuangan dan lainnya yang diberikan kepada rezim tersebut oleh Armenia (Ayat 186).

**- Bagaimana konsekuensi keputusan Mahkamah tersebut bagi negara-negara lain?**

- Mahkamah dalam keputusannya membuat referensi-referensi khusus untuk dokumen-dokumen hukum humaniter internasional yang berhubungan dengan pendudukan militer, dan menentukan bahwa referensi-referensi tersebut ada hubungannya dengan kasus yang disebutkan di atas. Pelanggaran kewajiban yang berkaitan dengan norma-norma imperatif hukum internasional umum – Armenia telah melanggar sejumlah norma – hal ini menimbulkan konsekuensi tambahan bukan hanya untuk Armenia saja, tetapi juga untuk negara-negara lain. Konsekuensi ini meliputi *inter alia* tugas-tugas seperti kerja sama negara-negara untuk menanggulangi pelanggaran-pelanggaran serupa itu secara legal, non-pengakuan legal atas keadaan yang timbul karena pelanggaran-pelanggaran ini, dan penolakan membantu konservasi keadaan serupa seperti ini.

Salah satu prinsip dasar hukum internasional umum adalah bahwa okupasi wilayah dengan menggunakan kekuasaan atau ancaman dianggap tidak sah. Prinsip tersebut ditegaskan lagi dalam resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) dan 884 (1993) yang berkaitan dengan konflik bersenjata ini. Pengertian ini juga berlaku untuk hak dan kebebasan individu, dan pelanggaran-pelanggarannya tidak akan dapat memberi hasil yang direncanakan oleh pelaku sebelumnya dan bersandar pada kepentingannya.

***Distrik Lacin sampai sekarang berada di bawah pendudukan angkatan bersenjata Armenia***



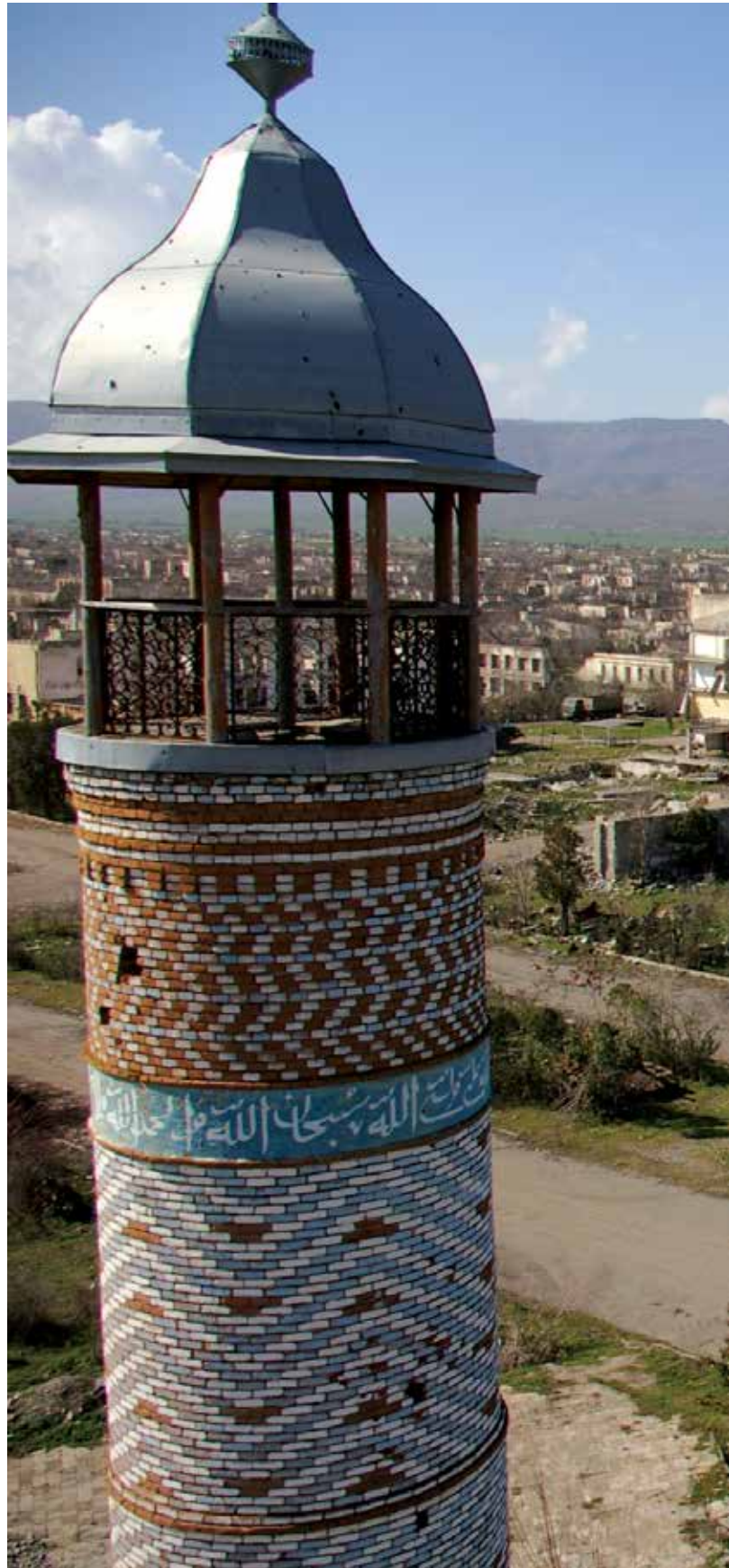


Oleh karena itu adalah penting jika masyarakat internasional mendesak pelaksanaan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut penarikan pasukan Armenia dari wilayah Azerbaijan yang diduduki dan pendudukan kembalinya dengan aman dan layak orang-orang - yang dipindah paksa - ke kampung halamannya. Adapun resolusi-resolusi ini adalah yang dirujuk oleh Mahkamah dalam keputusannya secara global. Keputusan Mahkamah ini juga menunjukkan kinerja para pemimpinnya bersama dengan Grup Minsk OKKE.

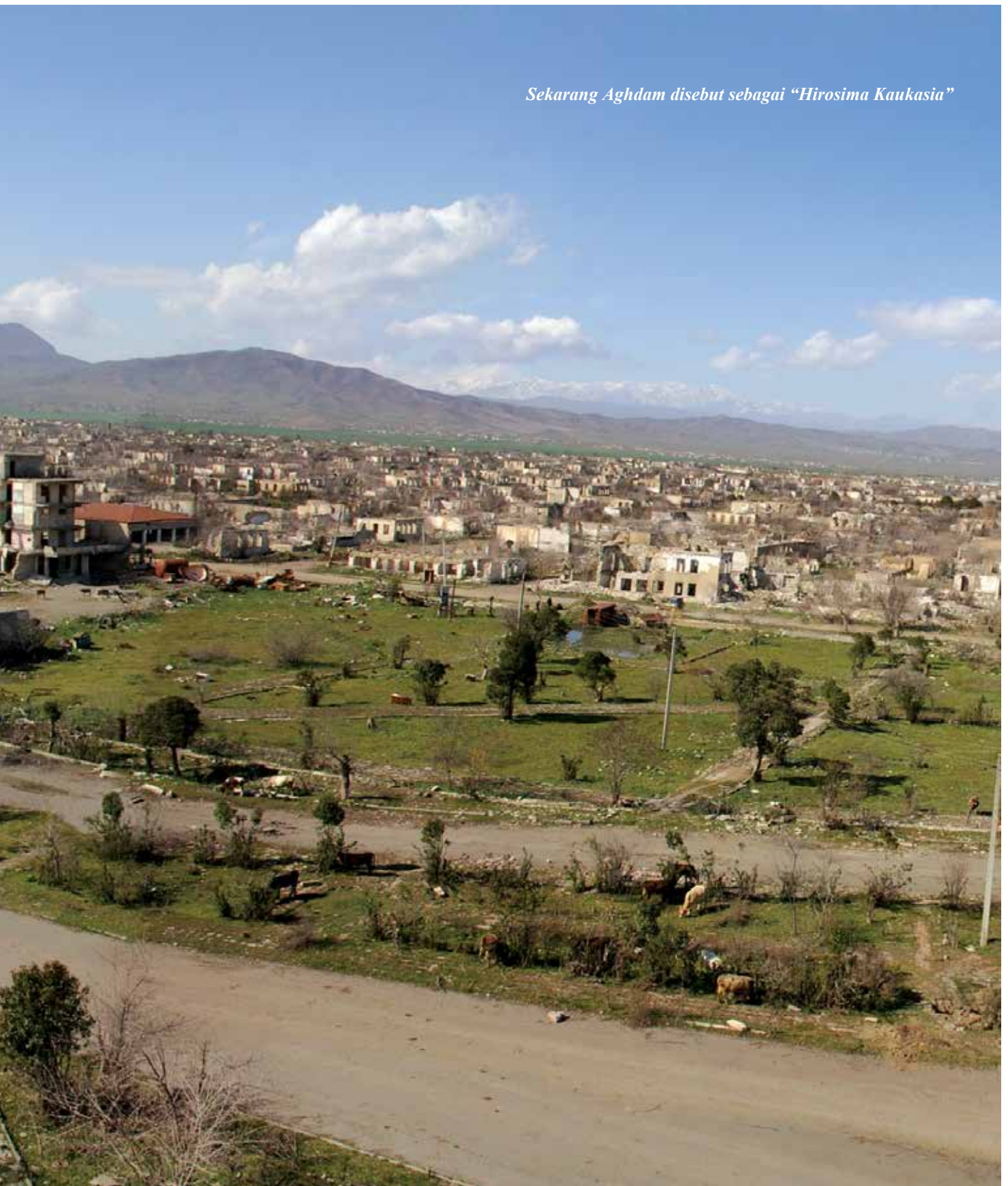
**- Pihak Armenia mengklaim bahwa ketua Komite menteri-menteri Dewan Eropa dan menteri luar negeri Bosnia-Herzegovina - Igor Krnadak -, dalam pidatonya pada sidang musim panas Majelis Parlemen Dewan Eropa pada tanggal 22 Juni, diduga menegaskan bahwa proses penyelesaian konflik yang sedang berlangsung sejalan dengan kerangka kerja para wakil pemimpin Minsk Group dan tidak ada hubungannya dengan keputusan-keputusan Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia. Bagaimana Anda mengomentari pernyataan ini?**

- Pernyataan Armenia tersebut merupakan kepalasan yang dilakukannya lagi. Rekaman video pidatonya Mr. Krnadak itu bisa didapat dalam bentuk on-line. Pada kenyataannya, menjawab pertanyaan mengenai pelaksanaannya keputusan Mahkamah, Mr. Krnadak mengatakan – berikut saya kutipkan di sini – “Komite menteri-menteri akan memulai pengawasan pelaksanaannya keputusan-keputusan tersebut, dan tentu saja, para pemimpin bersama-sama akan mencurahkan perhatian lebih besar lagi padanya, itu penting sekali bagi kami”. Beliau juga menambah bahwa “menurut Pasal 46 dari Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, eksekusi keputusan Mahkamah merupakan hal yang wajib dilaksanakan bersama dengan usaha yang akan terus dilakukan untuk menyetujui penyelesaian damai yang menyeluruh. Pihak Armenia salah mengomentari pernyataan Mr. Krnadak yang berkaitan dengan upaya perantaraan. Mr. Krnadak mengatakan bahwa “upaya perantaraan dalam penyelesaian konflik ini merupakan tanggung jawab Grup Minsk OKKE”. Diparfrasakannya sedemikian rupa pernyataan wakil resmi dari Dewan Eropa, setidaknya, adalah ketiadaan tanggung jawab dari pihak yang terkait.

**- Pihak Armenia mengklaim bahwa dalam kasus “Sargsyan menentang Azerbaijan”, ada beberapa pernyataan yang membuat Azerbaijan menahan diri untuk merespon terhadap masalah ini. Apakah ini benar, dan bagaimana respon Azerbaijan**



*Sekarang Aghdam disebut sebagai “Hirosima Kaukasia”*





### *Sidang Mahkamah pada kasus “Ciragov dan lainnya vs Armenia”*

#### **terhadap keputusan Mahkamah ini?**

– Pertama, kami tidak menerima permintaan apapun untuk mengomentari soal istimewa ini. Tetapi saya dengan senang hati akan melayani rasa ingin tahu pihak Armenia. Seperti yang Anda ketahui, apabila warga-warga Azerbaijan mengajukan aduan ke Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia mengenai pelanggaran terhadap hak mereka yang ditentukan dalam Konvensi – Armenia – seperti biasa dalam kasus serupa ini, mengikuti apa yang dilakukan oleh warga Azerbaijan yaitu dengan mendorong seorang warga Armenia yang bernama Minas Sargsyan pada tahun 2006 untuk mengajukan aduan serupa ini ke Mahkamah. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mengurangi konsekuensi penimbangan yang tak ada presedennya oleh Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia mengenai pelanggaran hak asasi manusia dalam skala besar terhadap orang-orang Azerbaijan yang dipindah paksa akibat okupasi wilayah Azerbaijan oleh Armenia.

Singkatnya, kasus ini berasal dari aduan para pemohon yang menyatakan bahwa seolah-olah haknya untuk kembali ke desa Gulistan di distrik Goranboy Azerbaijan dan menggunakan miliknya ditolak. Terlebih dahulu saya kutip dalam Ayat 218, Mahkamah menegaskan bahwa pemohon tidak kehilangan haknya untuk rumah dan tanahnya di Gulistan. Lebih lanjut dicatat bahwa kasus ini tidak ada hubungannya dengan kehilangan hak milik. Selain itu juga ditegaskan bahwa hal yang diadu-

kan ini tidak didorong oleh tendesi apapun yang bertujuan atas kendali penggunaan hak milik.

Tidak ada tambahan apa-apa lagi yang dapat saya katakan kecuali mengulang lagi apa yang sudah saya sampaikan bahwa konsistensi dan ketetapan sikap Azerbaijan terhadap masalah para pengungsi dan orang-orang yang dipindah secara paksa. Kami adalah pihak yang paling berkepentingan dalam proses pengembalian orang-orang tersebut ke kampung halamannya secepat mungkin. Dalam kasus Ciragov, seperti dirujuk oleh Mahkamah, perpindahan penduduk secara paksa adalah akibat langsung dari tindakan ilegal Armenia. Sebenarnya, Armenia-lah yang selalu memunculkan hambatan dan mengajukan syarat-syarat yang tidak real agar mencegah kembalinya penduduk yang terusir ke tempat asalnya, khususnya di daerah Garabagh Atas Azerbaijan, dan untuk mengkonsolidasikan hasil



pembersihan etnis yang dilakukan secara masal. Secara konsisten dan berulang kali kami telah menyatakan bahwa perlunya diambil sejumlah langkah, mulai dari penarikan angkatan bersenjata Armenia, penghapusan peluru-peluru yang belum meledak, dan pemulihan wilayah-wilayah tersebut, agar terciptanya persyaratan untuk dapat mengembalikan penduduk yang terusir tersebut, dengan aman, nyaman dan layak.

Adapun kasus *Sargsyan menentang Azerbaijan*, ada sejumlah ketentuan penilaian dimana pihak Armenia hanya merendahkan dan tidak menyebutkan karena mereka membuat pihak lain yang terkait tidak nyaman. Dengan demikian, kekecewaan Armenia, dalam Ayat 215 dan 216, Mahkamah sekali lagi menegaskan bahwa ini merupakan konflik antara Armenia dan Azerbaijan. Dalam Ayat 30, Mahkamah mencatat bahwa "Republik Garabagh Atas" mengajukan klaim terhadap mantan distrik "Syaumyan" (Goranboy) sebagai sebagian dari wilayahnya. Setelah mempertimbangkan bukti yang diajukan, Mahkamah menetapkan dalam Ayat 134 dan 139 bahwa distrik dimana desa Gulistan terletak, merupakan wilayah dari Azerbaijan yang diakui secara internasional, dan dengan demikian menolak klaim yang diajukan oleh Armenia. Selain itu, dalam Ayat 130, Mahkamah menegaskan kembali bahwa penempatan militer itu bersifat sementara dan tidak mengakibatkan penyerahan kedaulatan.

**- Mengomentari pernyataan pihak Azerbaijan bahwa penarikan angkatan bersenjata Armenia akan menciptakan syarat yang kondusif bagi kembalinya orang-orang yang dipindah secara paksa, dan bahwa hal ini sama sekali tidak patut dianggap sebagai kompromi, pihak Armenia menyatakan bahwa Azerbaijan "dengan interpretasi yang "sewenang-wenang" dan "selektif", sekali lagi menentang usul yang terkandung dalam lima pernyataan para pemimpin negara-negara ketua, bersama dengan Grup Minsk OKKE. Pihak Armenia juga menyatakan bahwa para ketua bersama mempertimbangkan unsur-unsur yang diusulkan oleh mereka itu sebagai sesuatu yang integral dan upaya-upaya untuk mengutamakan beberapa unsur atas unsur-unsur yang lain, tidak memungkinkan untuk mencapai solusi yang seimbang. Bagaimana Anda dapat mengomentari-nya?**

- Bagi pihak Armenia ini bukanlah kali pertama mereka memutar balik inti proses perundingan. Sikap Azerbaijan terhadap masalah ini telah dinyatakan ulang dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri yang dibuat pada tanggal 16 Juni segera sesudah Mahkamah Eropa un-

tuk Hak Asasi Manusia mengumumkan keputusannya tentang kasus *Ciragov*. Kami menekankan dengan jelas bahwa Azerbaijan tidak menganggap penarikan kembali angkatan bersenjata Armenia dan pengembalian orang-orang Azerbaijan yang dipindah secara paksa sebagai "kompromi". Tetapi komentar pihak Armenia yang Anda rujuk, dengan nyata memperlihatkan siapa yang menghalangi pelaksanaan hak-hak asasi orang-orang yang dipindah secara paksa yang mana Mahkamah syaratkan untuk melindungi mereka.

Selain itu, memang tidak ada apa-apa dalam proposal dari para pemimpin yang mengidentifikasi penarikan pasukan Armenia atau pengembalian pengungsi Azerbaijan ke tempat asal mereka sebagai "kompromi". Ini adalah langkah-langkah kunci, dan jika tanpa hal ini maka penyelesaian konflik tidak akan pernah ada. Azerbaijan menggunakan pendekatan bertahap dalam penyelesaian konfliknya, dan pendekatan ini tidak dapat dihindari dan tidak memiliki alternatif lain. Para ketua bersama Grup Minsk OKKE menyadarinya, dan mandat mereka didasarkan pada pemahaman terhadap hal ini.

Penyelesaian konfliknya mungkin atas dasar kedaulatan dan keutuhan wilayah Azerbaijan dalam batas-batas yang diakui secara internasional. Keutuhan wilayah Azerbaijan tidak pernah dan tidak akan pernah menjadi buah perundingan. Azerbaijan tetap berkomitmen pada proses penyelesaian konfliknya didasari atas pengertian.

Pernyataan para ketua bersama tidak dapat menggantikan perjanjian damai menyeluruh yang berdasarkan hukum internasional, yang pernah diusulkan dan dikerjakan oleh Azerbaijan beberapa waktu yang lalu. Alih-alih mencari cara untuk memperpanjang *status-quo* pendudukan wilayah Azerbaijan, Armenia malah merevisi sikapnya yang tidak konstruktif yang makin sulit dipahami, khususnya dalam konteks keputusan terakhir Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia. Semakin cepat Armenia tunduk pada realitas ini, semakin cepat konfliknya akan diselesaikan, dan negara-negara dan bangsa-bangsa di kawasan ini akan mendapatkan keuntungan dari sisi kerjasama dan perkembangan ekonomi.

Azerbaijan sekali lagi mengimbau pihak Armenia agar tidak membuang waktu untuk mengelabui rakyatnya sendiri dan masyarakat internasional, melainkan harus menghentikan politik aneksasi dan pembersihan etnis, jalankan proses penyelesaian konflik secara konstruktif dan menepati tuntutan kewajiban internasionalnya. ✨